

Implementation of the food Security Program is the Sumorame Village government, candi sub-district, Sidoarjo district

[Implementasi Program Ketahanan Pangan Di Pemerintahan Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo]

Muhammad Zainul Arifin ¹⁾, Hendra Sukmana ^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstract. *This research study aims to describe and analyze the implementation of the food security program in Sumorame Village, Candi District, Sidoarjo Regency. This study uses a qualitative descriptive research method. The results of this study show that there are 4 aspects that affect the success of the food security program. First, communication during the implementation of the food security program is an important factor in the success of the program. Communication in Sumorame village has been carried out by a special socialization given by the village government to farmers and all community groups. The second is Resources, resources in terms of human implementation, involving farmer groups to coordinate and collaborate in carrying out the program. In terms of financial resources, it has been budgeted according to existing regulations, which is 20% of the total Village Fund. The resources of equipment or infrastructure facilities are not optimal enough, because there are several obstacles including limited agricultural land, natural factors and the geographical location of the agricultural area in Sumorame Village that is not supportive and the income of the hydroponics program is not optimal. Third, the disposition in general is that the attitude and response in the implementation of the food security program shows a positive attitude and high commitment from all parties involved. Fourth, namely the Bureaucratic Structure in Sumorame Village, so far all those involved have carried out their respective duties or functions and responsibilities by carrying out SOPs correctly.*

Keywords – Implementation, resilience, food.

Abstrak. *Studi penelitian ini bertujuan untuk Mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi program ketahanan pangan di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada 4 aspek yang mempengaruhi keberhasilan program ketahanan pangan. Pertama, Komunikasi selama implementasi Program ketahanan pangan merupakan faktor penting dalam keberhasilan program tersebut. Komunikasi di desa Sumorame sudah di laksanakan sosialisasi khusus yang diberikan oleh pemerintah desa kepada para petani dan seluruh keompok masyarakat. Kedua adalah Sumber Daya, sumber daya dari segi manusia pelaksanaannya melibatkan langsung kelompok tani untuk berkordinasi dan ber kolaborasi dalam menjalankan program tersebut. Untuk segi sumber daya finansial sudah dianggarkan sesuai regulasi yang ada yaitu sebesar 20% dari total Dana Desa. Pada sumber daya peralatan atau sarana prasarana belum cukup optimal, karena ada beberap kendala di antaranya Lahan Pertanian yang terbatas, Faktor alam dan letak geografis area pertanian di Desa Sumorame yang kurang mendukung serta penghasilan program hidrophonik kurang maksimal. Ketiga adalah Disposisi secara umum sikap dan respon dalam implementasi Program ketahanan pangan menunjukkan sikap yang positif dan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Keempat yaitu Struktur Birokrasi di Desa Sumorame sejauh ini semua yang terlibat sudah melaksanakan tugas atau fungsinya masing-masing serta tanggung jawab dengan menjalankan SOP dengan Benar.*

Kata Kunci – Implementasi, Ketahanan, Pangan

I. PENDAHULUAN

Program ketahanan pangan yang ada di Indonesia pada tahun 2022 kembali di perkuat dengan Permendesa PDTT nomor 07 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 ynung sebelumnya sempat menurun selama dua tahun terakhir karena adanya pandemi. Menurut *Global Food Security Index* (GFSI), indeks ketahanan pangan di Indonesia pada tahun 2022 mencapai level 60,2 yang artinya lebih tinggi dibandingkan dengan priode 2020-2021. Namun, ketahanan pangan di Indonesia saat ini masih sangat rendah, di bawa rata-rata global yang indexnya mencapai 62,2 di bandingkan rata-rata Asia Pasifik yang indeksnya mencapai 63,4 yang artinya lebih tinggi daripada Indonesia. Tetapi secara umum GFSI melihat harga pangan yang ada di Indonesia cukup terjangkau jika dibandingkan dengan negara lain, hal ini dapat dilihat dari skor affordability Indonesian yang mencapai 81,4 jauh diatas rata-rata jika dibandingkan dengan Asia Pasifik yang skornya mencapai 73,4. Indonesia sejauh ini sudah berhasil membangun infrastruktur pertanian, sehingga kemungkinan besar penyediaan pangan bisa teratasi dengan baik. Indonesia juga harus meningkatkan kualitas pangan dengan meningkatkan keragaman pangan dan standar gizi. Indonesia memegang

peranan penting dalam sektor pertaniannya karena harus memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya yang selalu bertambah setiap tahunnya. Sebagai negara agraris terbesar di dunia, Indonesia seharusnya mampu menjadi pengekspor bahan pangan bagi Negara-negara lain di dunia. Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Meski pola konsumsi masyarakat terhadap beras menurun, namun diketahui angka rawan pangan yang masih cukup tinggi di Indonesia walaupun semakin tahun semakin mengalami penurunan angka kerawanan pangan¹. Masih terdapat 81 kabupaten rentan rawan pangan di Indonesia². Indonesia dapat terancam mengalami krisis pangan dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Ada banyak hal yang menyebabkan suatu wilayah terancam mengalami krisis pangan seperti berkurangnya petani, keterbatasan sumber pangan, keterbatasan lahan, hingga keamanan pangan agar layak dikonsumsi masyarakat. Diperkirakan sebanyak 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Masih banyak penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka, khususnya di wilayah bagian timur Indonesia.

Pemenuhan Kebutuhan pangan dan menjaga Ketahanan pangan sangat penting bagi Negara Indonesia dan ini menjadi tugas kementerian pertanian, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan cakupan Geografis yang Luas berdasarkan undang-undang nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan Gizi adalah "kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi Negara sampai dengan perorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan" [1]. Dengan demikian suatu wilayah dikatakan berhasil dalam membangun ketahanan pangan jika ada peningkatan produksi pangan, distribusi pangan yang lancar serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi pada seluruh masyarakat

Perwujudan ketahanan pangan nasional dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil yaitu di pedesaan sebagai basis kegiatan pertanian, melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 menyebutkan penggunaan Dana Desa tahun 2022 di prioritaskan untuk penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan [2]. Kebijakan ini di dukung juga oleh kementerian keuangan dengan mengeluarkan peraturan Menteri keuangan nomor 190/PMK 07/2021 Tentang pengelolaan Dana Desa yang menyatakan Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa untuk kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani [3]. Maka program ketahanan pangan yang ada di desa wajib diselenggarakan dengan mengedepankan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kecukupan pangan. Kebijakan ketahanan pangan desa mengacu pada upaya pencapaian tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan, khususnya dalam penyelenggaraan desa bebas kemiskinan, desa bebas kelaparan, desa sehat dan sejahtera, serta desa yang memenuhi kebutuhan dasar. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa tujuan Pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan [4]. Hal ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022 yang menyatakan bahwa Dana Desa ditentukkan penggunaannya untuk program ketahanan pangan nabati dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) [5].

Peningkatan Produksi Pangan dilakukan dengan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif sesuai dengan pelaksanaan PP Nomor 68 Tahun 2002 yang bertujuan pada pemberdayaan masyarakat, ialah meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat yang berperan aktif dalam mewujudkan penyediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu dengan memanfaatkan kelembagaan sosial ekonomi yang telah ada dan dikembangkan ditingkat pedesaan [6]. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak dan Tingkat pertumbuhannya juga sangat pesat, menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas program dalam mensejahterakan Masyarakat, Melalui Perpres No 66 Tahun 2021 Pemerintah membentuk Badan Pangan Nasional, Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2020 mengundang Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi se-Indonesia Merumuskan rencana mengenai ketahanan pangan Indonesia pada Tahun 2021. Persiapan kerja sudah mulai berjalan dengan kelompok kerja teknis dan lintas sektor (pokja) Dewan Ketahanan Pangan. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi pangan, menjamin kecukupan pangan. Ketahanan pangan memiliki kaitan yang erat dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan dan ketahanan nasional. ketahanan pangan dalam arti keterjangkauan pangan juga berkaitan erat dengan upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia. tanpa dukungan pangan yang cukup dan bermutu, tidak mungkin di hasilkan sumberdaya manusia yang bermutu, oleh karena itu pemerintah berkomitmen agar ketahanan pangan dapat menjadi syarat yang mutlak bagi pembangunan nasional. Dengan adanya program ketahanan pangan tersebut pemerintah berharap agar membantu masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, dan dapat hidup sehat dengan gizi yang baik. Kebutuhan pangan dan gizi tersebut dilakukan dengan penerapan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Pemerintah kabupaten Sidoarjo terus mendorong di setiap desa agar memiliki inovasi di bidang ketahanan pangan. Apalagi saat ini pemerintah pusat menentukan minimal 20 persen dari dana desa yang harus digunakan untuk program ketahanan pangan. Pada saat ini ketahanan pangan di kabupaten Sidoarjo dalam menghadapi situasi darurat pangan

(*Global food security Indeks*) dapat di lihat dari 4 aspek yaitu yang pertama daya beli masyarakat, Sebagian besar masyarakat Sidoarjo bekerja di sektor industri dengan tingkat pendapatan yang relatif tinggi dibanding daerah lain di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan daya beli pangan masyarakat Sidoarjo secara umum cukup baik. Namun, masih ada sekitar 8-10% masyarakat Sidoarjo yang berpenghasilan rendah dan rentan terhadap guncangan harga pangan. Mereka perlu mendapat perhatian khusus saat terjadi krisis pangan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan program bantuan dan subsidi pangan yang ditargetkan ke kelompok masyarakat kurang mampu. Aspek yang kedua adalah ketersediaan pangan, Kabupaten Sidoarjo memiliki lahan pertanian yang cukup luas untuk produksi beras, sayur-sayuran, buah-buahan, dan palawija. Produksi pangan lokal Sidoarjo saat ini mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan masyarakatnya. Namun kejadian gagal panen akibat serangan hama, banjir, kekeringan perlu diantisipasi dengan menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga menjaga ketersediaan saprodi, irigasi dan sarana pertanian guna menunjang produksi pangan yang berkelanjutan. Cadangan pangan darurat dalam bentuk beras, kedelai, dan bahan pokok lain juga di siapkan untuk mengantisipasi kekurangan pasokan akibat gagal panen. Diversifikasi pangan lokal juga didorong untuk meminimalkan ketergantungan pada beras dan terigu. Misalnya dengan pangan lokal seperti jagung, ubi kayu, sagu, dan lainnya. Sarana logistik seperti gudang penyimpanan dan transportasi cadangan pangan darurat juga dipersiapkan dengan baik agar siap digunakan saat dibutuhkan. Dengan persiapan yang baik dari hulu hingga hilir, diharapkan ketersediaan pangan di Sidoarjo akan tetap aman meskipun terjadi situasi darurat seperti gagal panen. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memastikan pengawasan keamanan pangan semakin diperketat, baik pada rantai pasok pangan lokal maupun pangan impor. Pengawasan dilakukan bekerja sama dengan Badan POM dan Dinas Kesehatan untuk memastikan pangan aman dari cemaran mikroba, logam berat, residu pestisida, dan bahan berbahaya lainnya. Sertifikasi dan labelisasi halal juga diterapkan pada seluruh mata rantai pangan untuk menjaga integritas kehalalan bagi masyarakat muslim. Edukasi dan sosialisasi kepada pelaku industri pangan untuk menerapkan manajemen keamanan pangan yang baik, seperti GMP dan SSOP. Menyiapkan protokol darurat dan rencana kontinjensi jika terjadi insiden keamanan pangan seperti keracunan massal. Melakukan pemantauan harga pangan secara rutin untuk memastikan tidak ada lonjakan anomali akibat spekulasi yang dapat memicu keresahan masyarakat. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan kesiapsiagaan sistem kewaspadaan pangan yang melibatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Pada aspek Sumber daya alam Pemerintah kabupaten Sidoarjo perlu menjaga ketersediaan lahan pertanian dan mencegah alih fungsi lahan pertanian produktif untuk kepentingan industri atau perumahan. Pemerintah juga memastikan ketersediaan air untuk irigasi pertanian melalui optimalisasi sistem irigasi dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Mengembangkan lahan pertanian dengan teknik *agricultura* berkelanjutan untuk menjaga kesuburan tanah dan produktivitas lahan. Mendorong diversifikasi tanaman pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras, misalnya dengan tanaman pangan lokal. Mengelola perikanan tangkap dan budidaya secara berkelanjutan untuk menjaga produktivitas sumber daya perikanan. Menerapkan sistem peternakan ramah lingkungan untuk menjaga produksi susu dan daging. Melakukan penghijauan lahan kritis dan reboisasi untuk mencegah erosi dan kekeringan yang berdampak pada produksi pangan. Dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya tanaman produktif skala rumah tangga. Untuk mendukung program ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga mengeluarkan peraturan Bupati Sidoarjo nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022. Peraturan tersebut mengatur penggunaan anggaran tahun 2022 untuk penguatan kapasitas Petani dan Nelayan, Penanggulangan kemiskinan sesuai prioritas wilayah dan percepatan penurunan stunting [7].

Implementasi Program ketahanan pangan di Desa Sumorame sudah berjalan sejak tahun 2022. Pada saat itu pemerintah pusat membuat program ketahanan pangan bertujuan untuk pemulihan ekonomi setelah adanya wabah Covid 19 yang mengakibatkan perekonomian di Indonesia menurun. Desa Sumorame juga merasakan dampak dari adanya wabah Covid 19 yang menyebabkan banyak para pekerja yang diberhentikan secara paksa. Dan pemerintah menginisiasi Program ketahanan pangan dilaksanakan untuk pemulihan ekonomi di setiap Desa, salah satunya di Desa Sumorame pada tahun 2022 telah mengalokasikan Rp 227.222.810,88 untuk kegiatan program ketahanan pangan di bidang Pertanian dan Perikanan, Banyak masyarakat yang ikut serta membantu adanya program ketahanan pangan khususnya masyarakat yang kehilangan pekerjaan setelah adanya wabah Covid 19. Pemerintah Desa Sumorame untuk kegiatan program ketahanan pangan dibidang pertanian berfokus pada bantuan bibit padi unggul dan bantuan obat-obatan pertanian selain itu juga di laksanakan perbaikan saluran irigasi persawahan hal ini dilakukan agar hasil panen meningkat sehingga terpenuhinya kebutuhan pangan di tingkat desa pasca wabah covid 19. Pemerintah Desa Sumorame juga berupaya untuk pemulihan ekonomi masyarakat dengan melaksanakan kegiatan Pelatihan olahan makanan bergizi agar setelah pelatihan masyarakat bisa menciptakan usaha baru terkait olahan makanan bergizi, selain itu juga di bentuk kelompok masyarakat untuk mendapatkan pelatihan budi daya ikan lele serta pemberian bantuan sarana prasarana budi daya ikan lele dengan harapan bisa memulihkan perekonomian masyarakat pasca wabah covid 19.

Pada tahun 2023 dampak wabah covid 19 masih di rasakan oleh masyarakat desa Sumorame terutama pada faktor ekonomi. Pemerintah Desa Sumorame pada Tahun 2023 mengalokasikan anggaran untuk program ketahanan pangan sebesar Rp 257.687.500,00. Kegiatan Program Ketahanan pangan tersebut antara lain pelatihan pemanfaatan lahan sempit, bagi warga yang tidak punya lahan di edukasi untuk memanfaatkan lahan sempit dengan pelatihan pembuatan Hidroponik serta pendampingan pasca pelatihan sampai dengan panen dan terus di dampingi oleh nara sumber secara berkelanjutan sedangkan di bidang Perikanan bantuan di Fokuskan pada budidaya ikan lele yang sudah di bentuk

kelompok masyarakat pada tahun 2022 yang sampai saat ini masih di jalankan dan sudah beberapa kali panen. Program ketahanan pangan dibidang pertanian masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu pemberian bantuan bibit padi, bantuan obat-obatan pertanian dan perbaikan saluran irigasi persawahan. Dibawah ini adalah rekapitulasi data ketahanan pangan di Desa Sumorame Kecamatan Candi.

Berdasarkan tabel 1. Terlihat dari data diatas bahwa program ketahanan pangan di Pemerintah desa Sumorame belum terealisasi secara maksimal dikarenakan ada beberapa permasalahan, yang ada di ketahanan pangan di Desa Sumorame seperti lahan pertanian yang kurang luas serta sarana prasarana pertanian yang kurang memadai.

Tabel 1. Rekapitulasi Anggaran program ketahanan pangan di Pemerintah Desa Sumorame Kecamatan Candi

No	Nama Program	Tahun	Jumlah Anggaran	Anggaran Terpakai	Terealisasi
01.	Bantuan perikanan	2022	Rp 18.000.000,-	Rp 17.638.400,-	97 %
02.	Bantuan Bibit pertanian	2022	Rp 45.600.000,-	Rp 45.525.900,-	99 %
03.	Bantuan obat-obatan pertanian	2022	Rp 64.031.710,-	Rp 57.756.770,-	89 %
04.	Pelatihan olahan makanan bergizi	2022	Rp 77.884.300,-	Rp 77.430.475,-	95 %
05.	Pemeliharaan irigasi persawahan	2022	Rp 10.000.000,-	Rp 10.000.000,-	100 %
01.	Bantuan perikanan	2023	Rp 7.000.000,-	Rp 1.588.000,-	23 %
02.	Bantuan Bibit pertanian	2023	Rp 45.600.000,-	Rp 44.100.000,-	96 %
03.	Bantuan obat-obatan pertanian	2023	Rp 5.000.000,-	Rp 4.930.000,-	98 %
04.	Bantuan Perlengkapan Hidroponik	2023	Rp 189.087.500,-	Rp 189.078.700,-	99 %
05.	Pemeliharaan irigasi persawahan	2023	Rp 7.000.000,-	Rp 7.000.000,-	100 %

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Sumorame Kecamatan Candi (2023)

Berdasarkan tabel 1. Terlihat dari data diatas bahwa program ketahanan pangan di Pemerintah desa Sumorame belum terealisasi secara maksimal dikarenakan ada beberapa permasalahan, Dari observasi dilapangan terdapat beberapa masalah dalam implementasi ketahanan pangan di Pemerintah Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, diantaranya yang pertama adalah lahan pertanian yang terbatas Sehingga efektifitas program pada sektor pertanian kurang maksimal hal ini dapat dilihat pada penyerapan anggaran Tahun 2022 untuk bantuan bibit pertanian tahun 2023 sebesar 99% dan bantuan obat-obatan pertanian hanya 89 %, pada tahun 2023 penyerapan anggaran untuk bibit pertanian 96% dan bantuan obat-obatan pertanian 98%, Ke-dua Infrastruktur pertanian yang kurang memadai khususnya pada Sistem irigasi persawahan meskipun program pemeliharaan irigasi persawahan terserap 100% namun itu tidak cukup efektif ketika Musim Hujan, Karena masih sering terjadi banjir ketika musim hujan yang mengakibatkan sebagian lahan pertanian tenggelam, Yang ke tiga adalah budidaya ikan lele, pemerintah desa sudah berupaya unuk melaksanakan program ketahanan pangan dengan melaksanakan pelatihan budi daya ikan lele dan memberikan sarana prasarana berupa kolam lele, bibit, dan pakan setelah proses pembinaan dan pendampingan hasil budi daya kan lele cukup berhasil namun dalam jangka panjang para pelaku budi daya ikan lele ini kesulitan dalam proses penjualan hasil panen sehingga profit yang didapat kurang maksimal sehingga pada tahun 2023 anggaran bantuan perikanan hanya terserap 23%. Yang terakhir adalah pemanfaatan lahan sempit berupa Pelatihan Hidroponik dan bantuan perlengkapan hidroponik kepada masyarakat, Pada awalnya masyarakat sangat antusias karena ada pendampingan yang sangat kompeten dari narasumber. Pendampingan ini dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga hasil dari tanaman hidroponik ini sangat bagus, Meskipun pada tahun 2023 Anggaran program Hidroponik ini terserap 99% namun dalam jangka panjang setelah dikalkulasi hasil panen dan biaya operasional selama proses pertumbuhan tanaman hidroponik kurang maksimal sehingga sebagian masyarakat belum merasakan manfaat dari program tersebut.

Dari observasi dilapangan peneliti memilih teori implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh George Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu factor (1) komunikasi, Menurut Edward III komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikasi kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan public perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan yang diharapkan (2) sumberdaya, bahwa factor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan Sumber Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan (3) disposisi Pengertian disposisi menurut Edward III dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan

kebijakan dapat diwujudkan”.Edward III mengatakan bahwa :Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.dan (4) struktur birokrasi yaitu struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel [8].

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hendra Duwie Putra dkk (2022) yang berjudul “Implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan ketahanan pangan di kota Palembang” penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif [9]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi kebijakan berpengaruh sebesar 90,3 % terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kota Palembang dibuktikan dengan nilai validitas tinggi adalah pernyataan ketiga belas yakni indikator unsur pemerintah, (2) Pemberdayaan masyarakat berpengaruh sebesar 99,2% terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kota Palembang dengan nilai validitas tertinggi pada indikator usaha/industri rumah tangga, dan (3) Implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat secara bersama-sama berpengaruh sebesar 99,2% terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kota Palembang dengan nilai validitas tertinggi pada indikator persentase desa yang tidak punya akses penghubung yang memadai.

Kedua, pada penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dkk (2023) yang berjudul “ Implementasi Program Aksi Ketahanan Pangan di Kabupaten Indragiri Hilir” [10]. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian pada pandangan dan sikap aktor stakeholders . Hasil penelitian menunjukkan ketahanan pangan yang kompleks dengan keterkaitan antar banyak pelaku dan daerah dengan dinamika perubahan antar waktu, maka koordinasi dan sinergisitas yang baik merupakan kunci keberhasilan pembangunan. Untuk melaksanakan koordinasi dan senergi tersebut pemerintah membentuk dewan ketahanan pangan melalui koppres nomor 132 tahun 2021 yang mengatur koordinasi, evaluasi dan pengendalian upaya-upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 32 Dewan ketahanan pangan kabupaten/ kota. Implementasi program aksi ketahanan pangan di Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) dan program menuju ketahanan pangan dan gizi 2015 cukup baik, karena mengacu pada peraturan presiden nomor 22 tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. (Yulianti, Mulono Apriyanto, Ali Azhar, KMS. Novyar Satriawan Fikri 2023).

ketiga, pada penelitian yang dilakukan oleh Riyan Saputra (2022) yang berjudul "Implementasi Program Pendampingan Desa dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan" [7]. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian pada meningkatkan ketahanan pangan di Desa. Penelitian ini menggunakan teori Siagian, yang mencakup lima hal yaitu perlu untuk menganalisis implementasi program pendampingan Desa dalam meningkatkan ketahanan pangan adalah, sasaran, jangka waktu, biaya, jenis kegiatan, dan tenaga kerja. Jadi pendekatan teori Siagian tidak hanya berfokus terhadap pelaksanaan, tetapi juga berfokus pada kelompok sasaran. Hasil penelitian ini dalam Ketahanan Pangan telah menjadi masalah dalam kerangka pembangunan pertanian, Pentingnya penanganan masalah ketahanan pangan agar dapat memantapkan sistem ketahanan pangan untuk kepentingan dalam negeri, mengingat adanya perubahan lingkungan strategis dalam upaya yang dilakukan pemerintah [7].

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi program ketahanan pangan yang dilaksanakan di desa Sumorame dengan mengidentifikasi program-program ketahanan pangan apa saja yang sudah dilaksanakan selanjutnya menganalisis tujuan dan target dari masing-masing program ketahanan pangan tersebut. Apakah sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa. apakah kebijakan program tersebut sudah tepat sasaran dan menyeluruh dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di desa Sumorame, dengan mengkaji kesediaan anggaran untuk masing-masing program, mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam implementasi program ketahanan pangan serta mengukur tingkat partisipasi masyarakat desa sumorame dalam pelaksanaan program ketahanan pangan sehingga memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan program ketahanan pangan agar lebih efektif dan sesuai dengan kondisi desa.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Strauss dan Corbin dalam Cresswell, J. (1998:24) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan sebuah informasi yang tidak dapat diperoleh melalui teknik statistik atau pengukuran [11]. Tujuan penelitian kualitatif adalah cara untuk memahami data yang telah dihasilkan dari survei lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif agar peneliti dapat menganalisis dan mendeskripsikan fenomena yang diamati dalam penelitian, sehingga bisa dapat menarik kesimpulan dalam sebuah penelitian. Pemerintah Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo menjadi lokasi penelitian ini yang berfokus pada proses implementasi program ketahanan pangan. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data, dicatat, dan diamati seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan Data Sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung, sumber data

sekunder bisa di peroleh dari jurnal atau media massa. Teknik *purposive* sampling digunakan dalam penelitian ini sebagai sumber informasi data berdasarkan aspek-aspek tertentu. Kepala Desa, Kaur Perencana / Pejabat Pelaksana Kegiatan, Ketua Kelompok Tani, dan Masyarakat menjadi informan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016:274) data bisa diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi [12]. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder, peneliti menggunakan metode analisis oleh interaktif dari Miles dan Huberman (1994:12) yang meliputi Pengumpulan Data, Reduksi data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Teknik pengumpulan data dapat di lakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedua, Reduksi Data, reduksi data merupakan proses yang berupa selektif berfokus pada penyederhanaan, abstrak, dan transformasi data mentah dari catatan tertulis untuk menggabungkan informasi penting dan membuang informasi yang tidak perlu. Ketiga, Penyajian Data, penyajian data adalah kombinasi dari sebuah informasi yang dikumpulkan di lapangan dalam bentuk yang konsisten dan dapat lebih muda di akses. Dengan begitu lebih muda untuk mendapatkan gambaran umum dan dapat memudahkan melakukan penilaian secara keseluruhan. Keempat, Penarikan Kesimpulan, penarikan kesimpulan adalah mengumpulkan semua data berdasarkan bahan hasil peneliti di lapangan [13].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu sentral dalam pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam konteks ini, ketahanan pangan tidak hanya mencakup ketersediaan pangan, tetapi juga aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pasokan pangan bagi seluruh masyarakat desa. Implementasi kebijakan ketahanan pangan yang efektif di desa memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, yang memperhitungkan berbagai faktor dan dinamika lokal.

Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis bagaimana kebijakan ketahanan pangan dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat desa. Menurut Edwards, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

a. Komunikasi.

Komunikasi merupakan elemen krusial dalam implementasi program ketahanan pangan di desa. Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III, variabel komunikasi meliputi transmisi, kejelasan dan konsistensi. Aspek komunikasi berperan penting dalam pencapaian tujuan, dan juga berdampak pada bagaimana sistem manajemen diterapkan di lembaga. Komunikasi antara atasan dan bawahan sangat penting saat melaksanakan implementasi kebijakan. Mengingat pada dasarnya manusia tak bisa hidup tanpa komunikasi, komunikasi telah menjadi kebutuhan untuk saling bertukar informasi, menyampaikan perasaan dan juga berinteraksi [14]. Dalam bukunya *Communication Network* (1981), Everret M. Rogers dan Lawrence Kincaid mengklaim jika komunikasi merupakan tahap antara 2 orang maupun lebih dalam melakukan pembentukan serta pertukaran pengetahuan satu dengan lainnya, dengan tujuan saling memberikan pengertian mendalam. Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards III, variabel komunikasi meliputi kejelasan kebijakan, konsistensi pesan, saluran komunikasi yang efektif, umpan balik, pelatihan dan penyuluhan, serta transparansi. Dengan memperbaiki aspek komunikasi, program ketahanan pangan di desa diharapkan dapat berjalan lebih baik, mencapai tujuan yang diharapkan, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa.



Gambar 1. Musyawarah Desa Tentang Program Ketahanan Pangan tahun 2023
Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Sumorame (2023)

Berikut informasi hasil wawancara bersama Bapak Rochmanu selaku Kepala Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. “ Mengenai adanya Program ketahanan pangan yang di laksanakan Desa Sumorame sudah dilaksanakan Musyawarah Desa sekaligus sosialisasi langsung kepada masyarakat. “ (Wawancara 25 juni 2024).

Penjelasan pernyataan dari Bapak Rochmanu lebih dipertegas dengan pernyataan wawancara dari Bapak Warsono selaku Kaur Perencanaan Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, beliau menyampaikan pernyataan seperti berikut. “Ya memang Program ketahanan pangan wajib dilaksanakan di desa dengan memakai anggaran

minimal 20% dari Dana Desa untuk penguatan pangan di tingkat Desa, hal ini perlu adanya kegiatan penyebaran informasi mengenai program ketahanan pangan tersebut. dan dari pihak desa Sumorame sendiri sudah melakukan sosialisasi mengenai Program ketahanan pangan tersebut secara langsung kepada masyarakat.“ (Wawancara 25 juni 2024). Dengan adanya komunikasi yang sudah di jalankan dengan baik dari bebeapa komponen yang terlibat dalam program implementasi ketahanan pangan menurut Edward III akan mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

Fenomena diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi menurut Edward III sebagaimana komunikasi sudah berjalan secara maksimal dan sudah memberikan perhatian lebih terhadap target sasaran dalam proses suatu implementasi. Karena realita dilapangan sudah di lakukan sosialisasi resmi yang diadakan pemerintah Desa Sumorame mengenai Program ketahanan pangan Kepada warga Desa Sumorame, dari situ bisa dilihat proses implementasi pada aspek komunikasi sudah berjalan maksimal. Dan dalam pelaksanaan program tersebut pemerintah desa sumorame sudah melaksanakan Musyawarah Desa sebagai dasar dilaksanakannya program tersebut. Selanjutnya perlu adanya koordinasi yang jelas, konsisten, dan dua arah, antara pemerintah Desa Sumorame dengan masyarakat khususnya para petani agar program ketahanan pangan di desa dapat diimplementasikan lebih efektif. Sehingga ini dapat membantu mengatasi kesalahpahaman, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan , Implementasi yang baik juga memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengembangkan dan memperbaiki proses komunikasi sepanjang program berlangsung Dan dengan memfokuskan komunikasi pada misi dan tujuan organisasi, setiap implementasi dapat lebih efektif dan mencapai tujuannya.

b. SumberDaya.

Pada aspek sumber daya ini merupakan poin penting untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan sehingga program ketahanan pangan dapat terlaksana sesuai harapan pemerintah. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa factor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan *pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa " mungkin sumber daya yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf"* Edward III menekankan bahwa sumber daya manusia, atau staf, merupakan elemen yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Tidak peduli seberapa jelas dan konsisten pemerintah Desa untuk melaksanakan kebijakan tersebut, serta tidak peduli seberapa akurat perintah tersebut disampaikan, jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pekerjaan dengan efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Kepala Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, beliau menyatakan seperti berikut: *“Dari segi Sumber Daya untuk Pelaksana kegiatan program ketahanan pangan di Desa Sumorame menurut saya sangat kompeten karena melibatkan kelompok tani secara langsung sehingga saya berharap bisa membantu Pelaksanaan program ketahanan pangan di desa Sumorame.* “(Wawancara 26 Juni 2024)

Tabel 2. Pelaksana Kegiatan Program Ketahanan Pangan di Desa Sumorame

No	Nama	Pelaksana
1.	Warsono	Kaur Perencanaan (koodinator)
2.	Roburyani	Ketua Kelompok Tani

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Sumorame (2023)

Menurut George C Edward III, sumber daya adalah penggerak dan pelaku. Pada aspek sumber daya finansial juga sangat dibutuhkan untuk mendukung adanya implementasi sehingga tepat sasaran. Berdasarkan wawancara bersama salah satu pelaksana kegiatan Program Ketahanan Pangan dari unsur petani menjelaskan bahwa *“ Dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan sudah dianggarkan Honor tim pelaksana kegiatan yang di sesuaikan dengan peraturan Bupati nomor 98 tahun 2022 mengenai honorarium pelaksana kegiatan sehingga dapat memicu kinerja pelaksana kegiatan untuk lebih maksimal.* “ Ucapnya (Wawancara 27 Juni 2024).

Selanjutnya pada aspek sumber daya anggaran adalah aspek terpenting dari implementasi program ketahanan pangan di Desa Sumorame. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumberdaya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Pemerintah Desa Sumorame sudah menganggarkan program ketahanan pangan tahun 2022 sebesar Rp227.222.810,88 dan tahun 2023 sebesar Rp257.687.500,00 dari dana APBN. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Desa Sumorame Endang Noer Anisah menjelaskan bahwa “ Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 menyebutkan penggunaan Dana Desa tahun 2022 di prioritaskan untuk penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan dengan adanya regulasi tersebut maka pemerintah Desa Sumorame sudah menganggarkan kegiatan program ketahanan pangan yang di tetapkan melauli APBDes tahun 2022 dan Tahun 2023 ” (Wawancara 26 juni 2024). Dengan adanya alokasi anggaran yang cukup maka proses implementasi program ketahanan pangan diharapkan berhasil.

Pada aspek sumber daya peralatan sangat berpengaruh pada Keberhasilan implementasi program ketahanan pangan. Di desa sumorame terdapat beberapa permasalahan yang kompleks di antaranya adalah lahan pertanian yang terbatas, Infrastruktur pertanian yang kurang memadai khususnya pada Sistem irigasi persawahan. Pemerintah Desa Sumorame sudah berupaya memberikan bantuan bibit unggul agar dengan lahan yang terbatas bisa mendapatkan hasil penen yang maksimal selain itu setiap tahun selalu menyiapkan anggaran untuk program pemeliharaan irigasi persawahan hal ini dapat di lihat pada penyerapan anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023. namun itu tidak cukup efektif ketika musim hujan, Karena masih sering terjadi banjir ketika musim hujan yang mengakibatkan sebagian lahan pertanian tenggelam.

Tabel 3. Sarana prasarana Program Ketahanan Pangan di Desa Sumorame

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Kolam Ikan	6 Unit
2.	Perlengkapan Hidroponik	44 Unit
3.	Bibit Unggul	2450 kg
4.	Obat Obatan Pertanian	10 Doz

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Sumorame (2023)

Berikut informasi hasil wawancara bersama Bapak Rochmanu selaku Kepala Desa Sumorame “ Pemerintah Desa Sumorame sudah berupaya memperbaiki sarana dan prasarana pertanian sesuai yang di butuhkan petani namun karena kondisi geografis area pertanian dan faktor alam yang kurang mendukung jika musim hujan mengakibatkan sebagian area pertanian tenggelam. “ (Wawancara 26 juni 2024).



Gambar 2. Kegiatan Implementasi Program Ketahanan pangan di Desa Sumorame

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Sumorame (2023)

Pemerintah Desa Sudah berupaya memperbaiki sarana dan prasarana pertanian namun hanya sebatas sesuai dengan kewenangan Desa. Letak Geografis area pertanian dan faktor alam sangat mempengaruhi pelaksanaan program ketahanan pangan. Akibatnya produktivitas pertanian menurun dan ketahanan pangan terancam.

Permasalahan Yang terakhir adalah pemanfaatan lahan sempit berupa Pelatihan Hidroponik dan bantuan perlengkapan hidroponik kepada kelompok masyarakat, Pada awalnya masyarakat sangat antusias karena ada pendampingan yang sangat kompeten dari narasumber. Pendampingan ini dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga hasil dari tanaman hidroponik ini sangat bagus, Meskipun pada tahun 2023 Anggaran program

Hidroponik ini terserap 99% namun dalam jangka panjang setelah dikalkulasi hasil panen dan biaya operasional selama proses pertumbuhan tanaman hidroponik kurang maksimal sehingga sebagian masyarakat belum merasakan manfaat dari program tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Warsono selaku Pelaksana kegiatan *“bahwa ada beberapa kelompok masyarakat pengelola hidrophinik mengeluhkan biaya pembayaran listrik untuk hidrophonik cukup besar karena butuh listrik 24 jam sehingga jika di kalkulasi hasil panen kurang maksimal”* (Wawancara 18 Juni 2023). Menurut Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana Prasarana lainnya. Jika semuanya terpenuhi sesuai yang di butuhkan maka keberlangsungan program atau implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik.

Pada Aspek sumber daya kewenangan cukup penting dalam melakukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa *Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.* Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Kepala desa Sumorame yang memiliki otoritas tertinggi sudah melaksanakan kewenangannya dalam pengambilan keputusan pada saat pembagian tugas dalam melaksanakan program ketahanan pangan yang diikuti oleh perangkat desa dan ketua kelompok tani serta kelompok masyarakat di Desa Sumorame. Namun yang menjadi kewenangan di tingkat Desa belum bisa menyelesaikan masalah karena ada permasalahan dari infrastruktur yang merupakan kewenangan di tingkat Kabupaten untuk menyelesaikannya. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asyifa dkk (2020) yang berjudul *” Implementasi kebijakan cadangan pangan Nasional dalam kondisi keadaan darurat di badan ketahanan pangan guna mendukung Pertahanan Negara”* [15] dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari aspek sumberdaya belum terlaksana dengan baik.

Dari fenomena diatas jika dikaitkan dengan teori implementasi menurut Edward III sebagaimana sumber daya belum maksimal, alasannya pada segi sumberdaya Peralatan masih ada beberapa masalah terkait infrastruktur pertanian. Letak Geografis area pertanian dan faktor alam sangat mempengaruhi pelaksanaan program ketahanan pangan. Sumber daya peralatan adalah bagian yang memengaruhi keberhasilan implementasi yang diberikan. Setiap sumber daya harus dikelola oleh sumber daya lain, apakah itu dari segi manusia atau peralatan. Menurut teori Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana Prasarana lainnya. Dengan kendala sumber daya peralatan, sebuah program tidak dapat berjalan secara efisien. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Kurnia dkk (2020) merekomendasikan seharusnya sumberdaya manusia baik Pemerintah maupun masyarakat ditingkatkan kembali mengenai keadaran, persepsi, motivasi dan keahlian dalam pencapaian cadangan pangan melalui sosialisasi. Jika salah satu dari sumber daya manusia atau Peralatan tidak berjalan efektif maka keberlangsungan program atau kebijakan akan berjalan lambat dan tidak sesuai yang di harapkan.

c. Disposisi

Disposisi merupakan salah satu elemen kunci dalam teori implementasi kebijakan Edward III. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan terhadap program yang dijalankan. Dalam konteks ketahanan pangan di desa Sumorame kecamatan candi kabupaten Sidoarjo, disposisi ini mencakup sikap dan persepsi aparat desa, petani, dan masyarakat terhadap kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan.

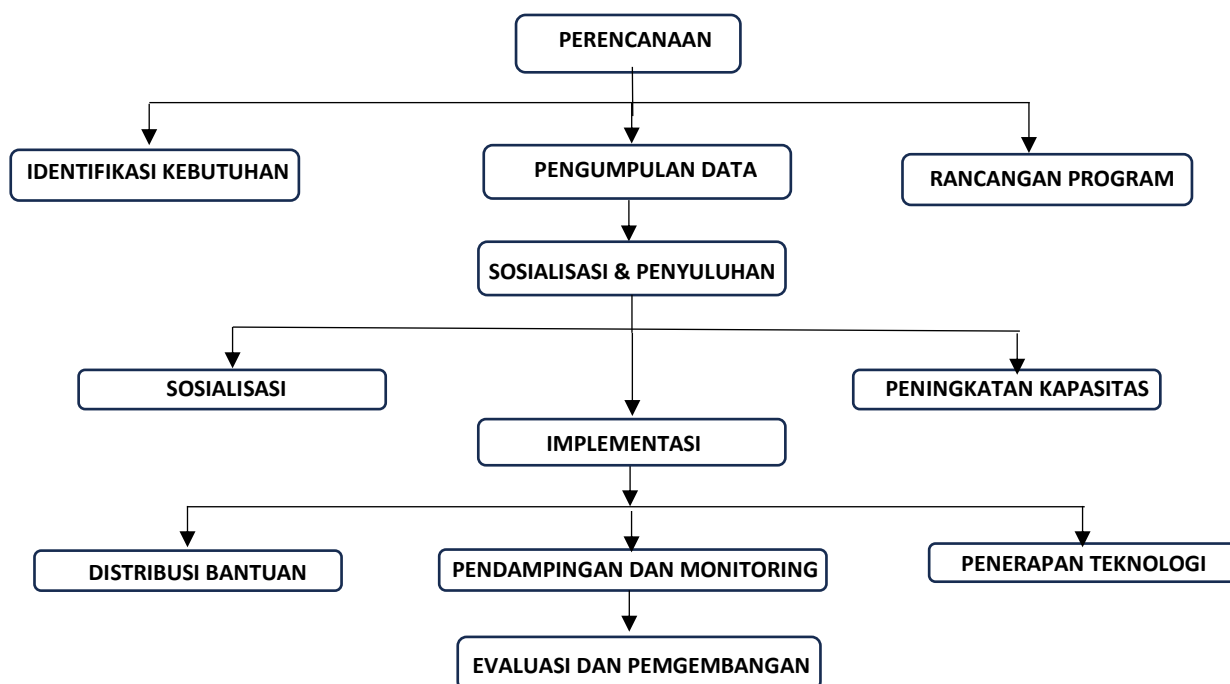
Aparat desa Sumorame memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan dan mengimplementasikan program ketahanan pangan. Berdasarkan hasil penelitian, sikap aparat desa terhadap kebijakan ketahanan pangan menunjukkan komitmen yang tinggi dan antusiasme dalam menjalankan program ini. Mereka aktif dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat serta berusaha untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Warsono selaku Kaur Perencanaan : *“Secara umum untuk pembagian kewenangan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, Ketua Kelompok Tani bertugas untuk berkordinasi dengan para petani dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, kelompok masyarakat yang di tunjuk dalam program hidrophonik sangat antusias dalam mengikuti pelatihan dan pengelolaan hidrophonik, aparatur Desa sebagai fungsi pelaksana anggaran dan pengawasan menjalankan tugasnya dengan baik dalam mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan tersebut,* (Wawancara 17 Juni 2024). Dari segi pembagian tugas pokok dan fungsi sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing, sehingga sangat mendukung keberhasilan implementasi program ketahanan di desa sumorame. Berdasarkan kondisi geografis Implementasi program ketahanan pangan di Desa Sumorame lebih dominan pada sektor pertanian hal ini dikarenakan masih terdapat lahan persawahan di Desa Sumorame. Petani merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di desa Sumorame. Disposisi petani juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi para petani dan beberapa dukungan dari beberapa

komponen masyarakat. Persepsi masyarakat umum terhadap kebijakan ketahanan pangan juga mempunyai peran penting dalam keberhasilan implementasi. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya ketahanan pangan cenderung lebih mendukung dan berpartisipasi dalam program yang diadakan. Pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah desa dan penyuluh pertanian sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi positif masyarakat. Namun, terdapat tantangan dalam mengubah persepsi masyarakat yang masih bergantung pada metode tradisional dan kurang terbuka terhadap inovasi pertanian. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan dkk (2023) yang berjudul "Implementasi Program Ketahanan Pangan" [16] dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Disposisi/sikap pelaksana belum maksimal karena lambatnya proses penurunan disposisi sebuah kebijakan.

Dari pernyataan diatas bahwa fenomena tersebut jika dikaitkan dengan teori implementasi menurut Edward III bahwa disposisi dilapangan sudah terlaksana dengan baik, Dengan demikian, jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Rio dkk (2023) disposisi sebagai elemen penting dalam teori Edward III memegang peran krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan ketahanan pangan di desa. Sikap positif dan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat dapat meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan dan pada akhirnya mewujudkan tujuan program ketahanan pangan di desa Sumorame yang berkelanjutan.

d. Struktur birokrasi

Teori Edward III pada variabel yang terakhir juga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, dimana fokus pembahasan ini adalah pada variabel struktur birokrasi, yang melibatkan organisasi, prosedur, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap implementasi [17]. Pemerintah Desa Sumorame mengatur pembagian tugas dengan jelas antara perangkat desa, kelompok tani, dan masyarakat. Pemerintah desa berfungsi sebagai penyelenggara program implementasi ketahanan pangan di desa sumorame, sementara kelompok tani bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis di lapangan terkait bantuan bibit unggul tanaman pangan dan perbaikan saluran irigasi persawahan. Kelompok masyarakat dalam program ketahanan pangan ini juga dilibatkan dalam pemanfaatan lahan sempit diantaranya pembuatan Hidroponik dan kolam terpal untuk budi daya ikan lele. Dari hasil wawancara bersama kepala desa Sumorame Bapak Rochmanu mengatakan bahwa : *"Pembagian tugas sudah dilaksanakan sesuai kapasitasnya masing-masing dan standard operasional Prosedur dalam melaksanakan program ini sudah dilakukan sedemikian rupa, sehingga program ini dapat dilaksanakan dengan benar dan tepat."* (Wawancara 17 Juni 2024).



Gambar 3. SOP Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Sumorame

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Sumorame (2023)

Struktur hierarkis ini membangun adanya koordinasi yang efektif dan tanggung jawab yang terdistribusi dengan baik. Kepala desa memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan, diikuti oleh perangkat desa dan ketua kelompok tani. Hierarki pengawasan ini memastikan adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Program ketahanan pangan di Desa Sumorame diimplementasikan melalui SOP yang terstruktur dan mendetail untuk setiap tahapan program, mulai dari distribusi bibit unggul tanaman pangan yang langsung di bagikan oleh pemerintah desa Sumorame kepada kelompok tani sehingga langsung bisa di dimanfaatkan oleh para petani, pelatihan sistem hidroponik juga dilaksanakan sebelum pemberian perlengkapan hidroponik kepada kelompok masyarakat. pemerintah desa juga bekerjasama dengan tenaga ahli untuk melaksanakan pendampingan secara berkelanjutan pada pengelolaan sistem hidroponik mulai dari penyemaian hingga pasca panen serta pendistribusian hasil panen. Prosedur pengawasan dan pelaporan dilakukan secara transparan untuk meminimalkan potensi korupsi dan penyalahgunaan dana. Setiap pembelian bibit dan alat pertanian harus melalui proses pengadaan yang terbuka dan hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap program. SOP ini dirancang untuk memastikan setiap langkah yang dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Desa Sumorame menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian dan perikanan melalui koordinasi dengan pihak kecamatan untuk mendapatkan dukungan teknis dengan harapan dapat memperoleh informasi teknologi pertanian terbaru. Koordinasi antara semua pemangku kepentingan dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi kemajuan program dan memecahkan masalah yang muncul. Hal ini memastikan adanya komunikasi yang baik dan tindakan korektif yang cepat jika diperlukan. Pelatihan berkala diberikan kepada perangkat desa dan kelompok tani mengenai teknik pertanian modern, manajemen keuangan, dan aspek-aspek lain yang relevan dengan ketahanan pangan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja sumber daya manusia dalam pelaksanaan program.

Fenomena dari pernyataan mengenai struktur birokrasi diatas jika dikaitkan dengan teori Edward III dimana struktur birokrasi sudah dilaksanakan dengan benar khususnya pada pembagian tugas dan fungsi Aparatur Desa sudah dilaksanakan secara struktural sesuai jobdesknya masing-masing. Pemerintah Desa Sumorame sudah memperhatikan dan melaksanakan Standart Operasional Prosedur (SOP) pada Implementasi Program ketahanan pangan di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Terbukti bahwa program tersebut sudah memberikan proses atau prosedur yang tepat. Karena SOP yang baik menurut teori Edward III ialah mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis kepada siapapun, sebab menjadi acuan dalam berlangsungnya kegiatan maupun bekerjanya implementor.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian tentang implementasi Program ketahanan pangan di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan dengan ditinjau dari 4 indikator yakni sebagai berikut Pertama, Komunikasi selama implementasi Program ketahanan pangan merupakan faktor penting dalam keberhasilan program tersebut. Komunikasi di desa Sumorame sudah cukup optimal karena sampai sekarang sudah di laksanakan sosialisasi khusus yang diberikan oleh pemerintah desa kepada para petani dan seluruh warga melalui Rt /Rw mengenai Program Ketahanan Pangan yang akan dilaksanakan. Kedua adalah Sumber Daya, sumber daya dari segi manusia pada implementasi Program Ketahanan pangan sudah kompeten karena dalam pelaksanaannya melibatkan langsung kelompok tani untuk berkordinasi dan berkolaborasi dalam menjalankan program tersebut. Untuk segi sumber daya finansial sejauh ini dalam implementasi Program ketahanan Pangan sudah dianggarkan sesuai regulasi yang ada yaitu sebesar 20% Dana Desa untuk kegiatan pelatihan dan pengadaan saran dan prasarana pertanian. Pada sumber daya peralatan atau sarana prasarana di Desa Sumorame dalam mendukung proses implementasi program ketahanan pangan belum cukup optimal, karena ada beberapa kendala di antaranya Lahan Pertanian yang terbatas , Faktor alam dan letak geografis area pertanian di Desa Sumorame yang kurang mendukung dan penghasilan program hidroponik kurang maksimal semua permasalahan ini memberikan tantangan signifikan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Ketiga adalah Disposisi secara umum sikap dan respon dalam implementasi Program ketahanan pangan sudah cukup optimal, halini dapat di rasakan dari sikap positif dan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat dapat meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan. Keempat yaitu Struktur Birokrasi di Desa Sumorame sejauh ini sudah melaksanakan sesuai dengan SOP. Dengan tugas atau jobdes masing-masing serta tanggung jawab dari semua yang terlibat dalam program ketahanan pangan. Dari keseluruhan hasil penarikan kesimpulan, bahwa peneliti merekomendasikan kepada Pemerintah Desa Sumorame agar lebih mengevaluasi dan perbaiki dari segi sumber daya fisik khususnya pada Pengembangan teknologi pertanian yang tepat guna untuk menekan efisiensi biaya operasional dan Komunikasi antara pemerintah daerah, petani, dan organisasi pendukung harus kuat untuk memastikan bahwa bantuan dan sumber daya yang diperlukan dapat segera di wujudkan

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan rasa syukur dan penghormatan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Swt atas berkat dan rahmat-Nya yang telah memungkinkan saya menyelesaikan jurnal dengan judul "Implementasi Program Ketahanan Pangan Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo." Penulisan jurnal ini merupakan bagian dari perjalanan saya untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana Administrasi Publik di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hidayatulloh, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Ibu Ilmi Usrotin Choiriyah, S.AP, M.AP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, dan Bapak Hendra Sukmana selaku dosen pembimbing di Universitas Muhammadiyah, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan saran berharga selama proses penyusunan jurnal ini. Keahlian dan pengetahuan Bapak dalam bidang ini sangat membantu kami dalam menyelesaikan penelitian ini dengan lebih baik. Para Dosen dan Staf Universitas Muhammadiyah yang telah memberikan dukungan akademik dan administratif selama proses penelitian dan penyusunan jurnal ini. Pemerintah Desa Sumorame yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pengumpulan data serta informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Para Petani dan Masyarakat Desa Sumorame yang telah memberikan waktu, informasi, dan kerjasama selama proses penelitian ini berlangsung, Keluarga tercinta dan Teman-teman yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi selama proses penyusunan jurnal dan yang telah bersama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir. Semoga jurnal ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ketahanan pangan, serta bermanfaat bagi masyarakat Desa Sumorame dan semua pihak yang berkepentingan.

REFERENSI

- [1] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi," *Lemb. Negara RI*, pp. 1–63, 2015, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5581>
- [2] Pemerintah Republik Indonesia, "Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa," *Dinamika*, vol. 2019, no. 961, 2021, [Online]. Available: <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/16313>
- [3] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK 07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa," no. 1424, 2021.
- [4] Peraturan Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014," *Peratur. Republik Indones.*, vol., no., p., 2014, doi: 10.1145/2904081.2904088.
- [5] P. R. Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260)," *Bpk.Go.Id*, pp. 1–11, 2021, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/188354/perpres-no-104-tahun-2021>
- [6] Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan," *Peratur. Perundang-undangan*, pp. 1–12, 2002.
- [7] R. Saputra, "Implementasi Program Pendampingan Desa Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan," *ULIL ALBAB J. Ilm. Multidisiplin*, vol. 1, no. 5, pp. 1223–1237, 2022, [Online]. Available: <http://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/view/254%0Ahttps://ulilalbabinstitute.com/index.php/JIM/article/download/254/213>
- [8] A. Hakim, O. A. Saputra, and C. Saleh, "Policy determination in E-budgeting implementation by the government of DKI Jakarta - Indonesia," *Int. J. Criminol. Sociol.*, vol. 10, pp. 149–167, 2021, doi: 10.6000/1929-4409.2021.10.19.
- [9] D. Putra, Hendra Duwie, "Jurnal Tanah Pilih PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DI," vol. 2, no. 2, pp. 85–99, 2022.
- [10] Y. Yulianti, M. Apriyanto, A. Azhar, and K. N. S. Fikri, "Implementasi Program Aksi Ketahanan Pangan Di Kabupaten Indragiri Hilir," *Selodang Mayang J. Ilm. Badan Perenc. Pembang. Drh. Kabupaten Indragiri Hilir*, vol. 9, no. 1, pp. 16–24, 2023, doi: 10.47521/selodangmayang.v9i1.293.
- [11] I. muttaqien A. Straus, I Corbin, "A. Straus, I Corbin, I muttaqien (11).pdf."
- [12] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. 2020.

- [13] M. B. dan A. M. H. Miles, "Mental health nursing is stretched to breaking point," *Nurs. Stand.*, vol. 30, no. 25, p. 33, 2016, doi: 10.7748/ns.30.25.33.s40.
- [14] S. A. Fatma and S. Zuhri, "LMI Develops Public Speaking Skills Speaking In Public," *Jkb J. Kabar Masy.*, vol. 1, no. 3, pp. 41–46, 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.54066/jkb.v1i3.534>
- [15] A. W. Kurnia, S. Sundari, D. A. Purwanto, and U. Pertahanan, "the Implementation of National Food Reserve Policy in Emergencies At the Food Security Agency To Support State Defense," *Manaj. Pertahanan*, vol. 6, no. 1, pp. 73–99, 2020, [Online]. Available: <http://www.fao.org/3/w3548e/w3548e00.htm>
- [16] R. Setiawan, Z. Rusli, and M. Mayarni, "Implementasi Program Ketahanan Pangan," *FOKUS Publ. Ilm. untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Univ. Kapuas Sintang*, vol. 21, no. 1, 2023, doi: 10.51826/fokus.v21i1.723.
- [17] L. Y. P. Cecep Kurniawan, Setyawan Widyarto, "Implementasi Struktur Birokrasi Strategi Pertahanan Laut Menghadapi Ancaman di Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara," *Strateg. Pertahanan Laut*, vol. 4, no. 1, pp. 1–18, 2018.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.